

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Ketimpangan gender di Indonesia masih terjadi hingga saat ini karena hegemoni negara yang patriarkis. Orde Baru mereduksi perempuan melalui proses domestikasi dan praktik ibuisme negara. Hal ini berhasil menghegemoni pemikiran masyarakat hingga anggota Dharma Wanita itu sendiri, dimulai dari Panca Dharma Wanita yang menjadi pedoman bagi organisasi ini. Meskipun saat ini keberadaannya belum memiliki kejelasan, namun konstruksi perempuan ideal dalam Panca Dharma Wanita berhasil mengakar pada pemikiran anggota DWP Banyumas. Anggota DWP Banyumas masih menganggap bahwa perempuan yang ideal sesuai dengan Panca Dharma Wanita di mana perempuan menjadi istri pendamping suami, ibu yang mendidik anaknya sebagai penerus bangsa, pengatur rumah tangga, pencari nafkah tambahan, dan masyarakat yang berguna. Kemudian, warisan Orde Baru ini dapat dilihat dari bagaimana pemikiran DWP Banyumas mengenai perempuan yang berkiprah di bidang politik yang ternyata sesuai dengan apa yang dikonstruksi oleh Orde Baru. Mereka masih beranggapan bahwa perempuan tidak sepatutnya berkiprah dalam politik karena politik itu kotor. Pemerintah sebagai penunjang kesadaran peran perempuan dalam politik kemudian justru hanya menggunakan anggota DWP sebagai alat untuk memperoleh suara seperti halnya Orde Baru. Hal itu kemudian berlanjut pada kesadaran peran DWP dalam proses pembuatan kebijakan yang cenderung kurang berpartisipasi dan hanya

menjalankan program yang diberikan oleh pemerintah Banyumas melalui DPPKBP3A.

Berdasarkan hasil penelitian yang mendasari penulisan artikel ini, terdapat temuan yang mengungkapkan bahwa DWP Banyumas saat ini mengalami stagnansi dalam setiap kegiatannya. Hal ini juga terjadi karena hegemoni Orde Baru dalam politik perempuan begitu kuat pada DWP Banyumas. Hegemoni orde baru yang begitu kuat membuat gerakan organisasi DWP Banyumas ini sulit untuk melakukan sebuah perubahan besar. Mereka cenderung melakukan pola-pola yang sama dengan Dharma Wanita pada Masa Orde Baru di mana mereka masih bergantung dan hanya menjalankan program-program yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut menimbulkan keraguan atas independensi yang dimiliki DWP Banyumas. Karena DWP Banyumas bergantung pada pemerintah, maka perlu adanya pemberdayaan politik bagi DWP Banyumas oleh pemerintah agar politik gender di Indonesia berjalan secara optimal. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, serta peran-peran politik perempuan untuk memperdalam partisipasi DWP sebagai organisasi perempuan di Kabupaten Banyumas.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, maka terdapat saran sebagai berikut:

- 1) Untuk mengatasi stagnansi yang dialami DWP, perlu adanya inovasi program kerja yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dan tidak

bergantung pada program-program yang diberikan oleh DPPKBP3A.

Sehingga, terdapat kemandirian yang terbangun dari organisasi tersebut;

- 2) Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam DWP, perlu adanya peningkatan kapasitas anggota dan sosialisasi pentingnya politik bagi perempuan dan warga negara. Dengan demikian, terdapat kesadaran yang tumbuh dalam diri setiap anggota agar dapat berperan aktif dalam kegiatan politik sebagai perempuan dan sebagai warga negara.

